



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN WAJO**



# PERUBAHAN RENJA



Jln. Kejaksaan No. 5 B Sengkang



Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021



<http://bkpsdm.wajokab.go.id>

**TAHUN  
2019**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya atas tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 ini menjadi komitmen bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam pencapaian visi dan misi organisasi, serta merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan reviu terhadap program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo yang telah direncanakan sebelumnya sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen Renja Pokok 2019. Perubahan mendasar yang tertuang dalam dokumen ini adalah perubahan pagu anggaran pada beberapa kegiatan sebagaimana Renja Pokok 2019. Perubahan selanjutnya adalah adanya penambahan beberapa kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2014-2019 dan dokumen Renja Pokok 2019, namun tidak terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2019. Salah satu alasan penambahan kegiatan dalam dokumen ini adalah adanya kegiatan yang tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami memerlukan saran-saran sebagai bentuk evaluasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya.

Sengkang, 2019

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia

**Drs. HERMAN**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19640728 199208 1 001





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-3
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.3. Landasan Hukum .....	I-3
1.4. Dasar Pertimbangan .....	I-7
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN WAJO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 .....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 .....	II-1
2.2. Reviu terhadap Evaluasi Hasil Renja Tahun 2019 dan Revisi Renstra Tahun 2014-2019 .....	II-3
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	III-1
BAB IV PENUTUP .....	IV-1
4.1. Catatan Penting .....	IV-1
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	IV-1
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....	IV-2





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	II-2
Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 .....	II-2
Tabel 2.3. Reviu terhadap Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .....	II-6
Tabel 2.4. Reviu terhadap Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur .....	II-9
Tabel 2.5. Reviu terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran...	II-10
Tabel 2.6. Reviu terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .....	II-11
Tabel 2.7. Reviu terhadap Program Penataan SIMPEG .....	II-12
Tabel 2.8. Reviu terhadap Program Perencanaan dan Pelaporan .....	II-13
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 .....	III-2





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui beberapa kegiatan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dapat menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga meniscayakan dilakukannya upaya akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan percepatan tersebut, maka tujuan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu berjalan dapat segera terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 merupakan



terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini memuat tentang alasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, yang berdampak pada pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan;
2. Adanya kegiatan baru yang harus dimuat dalam Renja Perubahan Tahun 2019 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan;
3. Adanya retensi yang harus dimuat dalam Renja Perubahan Tahun 2019;
4. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan atau digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, maka BKPSDM Kabupaten Wajo segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan menyusun Perubahan Renja Tahun 2019.



## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 bermaksud untuk memberikan arah bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan/atau tidak mengalami perubahan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo dan sebagai bentuk sinkronisasi terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019.

## **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 mengacu pada beberapa landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 77);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 14);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 9).
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo



Tahun 2016 Nomor 9);

32. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.

#### **1.4. Dasar Pertimbangan**

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 adalah terjadinya penambahan target kinerja, penambahan pagu kegiatan, serta penambahan dan penghapusan kegiatan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dasar pertimbangan dan sistematika penulisan dokumen.

##### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN WAJO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Bab ini memuat rewiu kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan realisasi capaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo Triwulan II Tahun 2019.

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN WAJO**

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, dan kesimpulan dari Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019.





## BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN WAJO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019

Berdasarkan Revisi Renstra Tahun 2014-2019, BKPSDM Kabupaten Wajo memiliki visi **mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja tinggi**. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai misi sesuai dengan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Wajo pada tahun 2019 berencana akan melaksanakan 6 program yang terurai dalam 40 kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2019 (*lihat* Tabel 2.1). Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2019, sebesar Rp. 10.214.418.306, berupa belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.283.747.306 dan belanja langsung sebesar Rp. 6.930.671.000.

Realisasi kinerja anggaran BKPSDM Kabupaten Wajo sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp. 2.033.484.650 atau 19,91%. Belanja tidak langsung yang dianggarkan untuk gaji dan tunjangan PNS termasuk di dalamnya tunjangan THR bagi PNS lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo terealisasi sebesar Rp. 1.745.301.409 atau 53,15%. Belanja langsung yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi sebesar Rp. 2.033.484.650 atau 29,34%.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang meliputi Renja Perangkat Daerah dan RKPD itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun 2019 (*lihat* Tabel 2.2.). Sebagai dampak dari dilakukannya Revisi Renstra pada tahun 2017, maka terjadi perubahan indikator kinerja



kegiatan atau output, sehingga evaluasi terhadap capaian Revisi Renstra merupakan akumulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mengalami perubahan selama tiga tahun, yaitu sejak 2017 sampai dengan 2019.

**Tabel 2.1.**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
		2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
		3. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
		4. Pendidikan formal
		5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Analisis Kebutuhan Diklat, Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS
		2. Seleksi penerimaan CPNS
		2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS
		3. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas
		4. Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas
		5. Pengambilan sumpah jabatan/Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas
		6. Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
		7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS
		8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS
		9. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-kinerja
		10. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-kinerja
		11. Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P
		12. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN
		13. Penyelenggaraan sidang majelis pertimbangan kepegawaian
		14. Pemberian penghargaan dan pelepasan pensiun PNS
15. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi		
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
		4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
		5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
		6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		10. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian



NO	PROGRAM	KEGIATAN
4.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan meubeleaur
		2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		4. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung kantor
5.	Program penataan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)	1. Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK
		2. Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN
6.	Perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Renja SKPD
		2. Penyusunan LAKIP SKPD
		3. Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD
		4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

## 2.2. Reviu terhadap Evaluasi Hasil Renja Tahun 2019 dan Revisi Renstra Tahun 2014-2019

Evaluasi hasil Renja Tahun 2019 dan Evaluasi Revisi Renstra Tahun 2014-2019 menunjukkan ada penambahan kegiatan dari yang semula direncanakan dalam dokumen Renja Tahun 2019 sebanyak 40 kegiatan, menjadi 42 kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diuraikan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS daerah. Indikator kinerja atau output kegiatan ini berupa jumlah CPNS yang telah mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat Baik. Dalam dokumen Renja, target output sebanyak 21 orang dengan anggaran sebesar Rp. 190.000.000. Sedangkan target output dalam DPA sebanyak 120 orang dengan anggaran sebesar Rp. 1.319.675.000. Perbedaan antara kedua dokumen tersebut terjadi akibat adanya penambahan jumlah formasi kebutuhan CPNS dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 269 orang. Melalui pembahasan Rancangan APBD di tingkat legislatif, output dan anggaran kegiatan ini diubah sebagaimana tercantum dalam dokumen DPA (*lihat Lampiran 2.1*). Pencapaian kinerja pada kegiatan ini menunjukkan realisasi 94%, dengan realisasi anggaran sebesar 63,37%.



2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah. Dalam dokumen Renja, indikator kinerja atau output kegiatan ini berupa jumlah PNS daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 4 orang, Diklat PIM III sebanyak 9 orang, dan Diklat PIM IV sebanyak 40 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 1.042.418.000. Namun penetapan pagu APBD pokok tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh target output, sehingga target prioritas kegiatan pada tahun 2019 adalah Diklat PIM II sebanyak 4 orang dengan anggaran sebesar Rp. 121.044.000. Namun realisasi kinerja pada triwulan II menunjukkan capaian 0%, yang berarti bahwa kegiatan ini belum dilaksanakan.
3. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat baik. Dalam dokumen Renja, output ditargetkan sebanyak 16 orang, yang terdiri atas penyuluh pertanian yang akan mengikuti Diklat Penyuluh, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. Akan tetapi melalui pembahasan Rancangan APBD di tingkat legislatif, output dan anggaran kegiatan ini diubah sebagaimana tercantum dalam dokumen DPA (*lihat Lampiran 2.1*), yang bertambah menjadi 22 orang, yaitu 6 orang untuk mengikuti Diklat Penilai Pajak, dengan anggaran sebesar Rp. 82.000.000. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini menunjukkan kinerja pada triwulan II menunjukkan capaian 0%, yang berarti bahwa kegiatan ini belum dilaksanakan.
4. Pendidikan dan pelatihan formal. Indikator kinerja atau output kegiatan ini berupa jumlah ASN yang mendapat bantuan pendidikan formal. Dalam dokumen Renja, target output sebanyak 6 orang dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000. Akan tetapi melalui pembahasan Rancangan APBD di tingkat legislatif, output dan anggaran kegiatan ini diubah sebagaimana tercantum dalam dokumen DPA (*lihat Lampiran 2.1*), yang bertambah menjadi 16 orang, yaitu bantuan biaya pendidikan terhadap 10 orang mahasiswa IPDN, dengan total anggaran sebesar Rp. 180.000.000. Tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 6,25% dengan anggaran sebesar 17%.
5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan predikat



Baik. Dalam dokumen Renja, target output sebanyak 80 orang dengan anggaran sebesar Rp. 137.279.000. Akan tetapi melalui pembahasan Rancangan APBD di tingkat legislatif, output dan anggaran kegiatan ini diubah sebagaimana tercantum dalam dokumen DPA (*lihat Lampiran 2.1*), menjadi 50 orang dengan anggaran sebesar Rp. 280.736.200. Tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 12% dengan capaian anggaran 0%.

Evaluasi hasil Renja menunjukkan bahwa dalam program ini, terdapat kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen Renja Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi penilai barang milik daerah. Kegiatan ini dimunculkan melalui pembahasan Rancangan APBD di tingkat legislatif (*lihat Lampiran 2.1*). Indikator kinerja atau output kegiatan ini berupa jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi dengan predikat baik sebanyak 15 orang dengan anggaran sebesar Rp. 82.000.000,-. Target kinerja pada triwulan II belum terealisasi atau 0%, yang berarti bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi belum dilaksanakan.
2. Pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyuapan. Penambahan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap perolehan sertifikat ISO yang memerlukan pengendalian dan evaluasi (*lihat Lampiran 2.1*). Target kinerja adalah jumlah PNS yang telah mengikuti kegiatan ini sebanyak 68 orang dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000. Hingga triwulan II belum ada realisasi kinerja maupun anggaran karena kegiatan ini ditargetkan baru akan terlaksana pada triwulan III.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kegiatan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebanyak 7 kegiatan.



**Tabel. 2.3.**  
**Reviu terhadap Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					
1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS daerah	113 orang	836.225.000	63,37%	538,10%	440,12%
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	0	0	0%	0%	0%
3. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	0	0	0%	0%	0%
4. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	0	0	0%	0%	0%
5. Pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	30.000.000	17%	16,67%	25%
6. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 orang	0	0%	7,5%	0%
7. Pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyuapan	0	0	0%	0%	0%

**b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program pembinaan dan pengembangan aparatur diuraikan sebagai berikut lain :

1. Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat sebanyak 2 dokumen, dengan anggaran sebesar Rp. 126.260.000. Tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0% karena proses penyusunan dokumen sedang berlangsung, sedangkan capaian anggaran sebesar 50,35%.
2. Seleksi penerimaan CPNS. Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS. Dalam dokumen Renja, target output sebanyak 100 orang. Akan tetapi karena masih berlanjutnya proses penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 ke tahun 2019, ditambah dengan estimasi formasi CPNS tahun 2019, maka output menjadi 369 orang dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000. Tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 72,90% dengan capaian anggaran 18,65%.



3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dengan dua indikator kinerja. Pertama, jumlah PNS yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu dengan target sebanyak 1.084 orang, hingga triwulan II mencapai 288 orang atau 26,57%. Kedua, jumlah PNS yang memperoleh kenaikan gaji berkala tepat waktu dengan target sebanyak 222 orang, terealisasi sebanyak 73 orang atau 32,88%. Realisasi kinerja keuangan untuk kegiatan ini sebesar 35,34%.
4. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,-. Kegiatan ini juga terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu jumlah PNS yang lulus ujian dinas ditargetkan sebanyak 5 orang, dan jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebanyak 50 orang. Kegiatan ini belum terealisasi baik dari kinerja maupun anggaran karena belum terlaksana, yang nantinya baru akan dilaksanakan pada triwulan III, sehingga seluruh realisasi dan capaian masih 0%.
5. Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator, dengan target jumlah penyelenggaraan sebanyak 3 kali dan anggaran sebesar Rp. 676.000.000. Realisasi kinerja adalah 1 kali atau 33,33%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 17,72%.
6. Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dengan target jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebanyak 600 SK dan anggaran sebesar Rp. 55.407.500. Realisasi capaian kinerja sebanyak 122 SK atau 20,33%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 5,61%.
7. Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas, yang ditargetkan akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan anggaran sebesar Rp. 34.900.000. Hingga triwulan II kegiatan ini terealisasi sebanyak 3 kali atau 75%, dengan menyerap anggaran sebesar 11,40%.
8. Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS, ditargetkan menghasilkan output sebanyak 6.137 orang PNS yang menerima monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000. Namun hingga triwulan II, kegiatan ini belum terlaksana.



9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS, dengan target output sebanyak 6.137 orang dan anggaran sebesar Rp. 127.000.000. Namun hingga triwulan II, kegiatan ini belum terlaksana.
10. Penyusunan sasaran kerja pegawai berbasis e-kinerja, dengan target output sebanyak 6.137 ASN yang telah menyusun SKP berbasis aplikasi e-kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000. Realisasi kinerja hingga triwulan II telah mencapai 3.061 orang ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 6.323.000 atau 21,08%.
11. Monitoring dan penyelesaian LP2P, dengan target output sebanyak 5.246 orang PNS yang menyelesaikan LP2P tepat waktu dengan anggaran sebesar Rp. 53.000.000. Kegiatan ini belum terealisasi baik dari kinerja maupun anggaran.
12. Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 56.060.000 dan ditargetkan akan menghasilkan dua output. Pertama, jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu sebanyak 132 orang. Kedua adalah jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN sebanyak 270 orang. Adapun realisasi kinerja terealisasi sebanyak 408 orang atau 101,49%, namun belum ada realisasi anggaran.
13. Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian, dengan output kegiatan sebanyak dua orang PNS yang menjalani sidang. Pada tahun ini, belum ada PNS yang menjalani sidang majelis pertimbangan kepegawaian, termasuk belum ada anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan ini.
14. Pemberian penghargaan dan pelepasan pensiun PNS. Kegiatan ini terdiri atas tiga indikator kegiatan atau output. Pertama, jumlah kartu peserta Taspen yang diterbitkan tepat waktu yang terealisasi sebanyak 9 kartu. Kedua, jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu ditargetkan 179 orang, dan terealisasi sebanyak 153 orang atau 85%. Ketiga, pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun ditargetkan 168 orang namun belum terealisasi dan akan dilaksanakan pada triwulan III. Adapun anggaran kegiatan ini adalah Rp. 343.450.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar 10,84%.
15. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, dengan target output sebanyak 400 orang PNS yang memperoleh penghargaan



satyalancana karya satya dan anggaran sebesar Rp. 59.208.000. Pada triwulan II kegiatan ini belum terlaksana.

**Tabel. 2.4.**  
**Reviu terhadap Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>					
1. Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat	0	63.566.000	50,35%	0%	127,13%
2. Seleksi penerimaan CPNS	269 orang	74.610.000	72,90%	269%	18,65%
3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	361 orang	94.771.500	35,34%	27,64%	30,77%
4. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	55 orang	29.400.000	0%	0%	0%
5. Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator	1 kali	119.756.804	17,72%	100%	32,58%
6. Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas	3 kali	3.978.750	11,40%	50%	2,65%
7. Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	122 SK	3.110.350	5,61%	20,33%	13,52%
8. Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS	3.661 orang	0	0%	59,57%	0%
9. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PNS	2.034 orang	0	0%	33,09%	0%
10. Penyusunan sasaran kerja pegawai berbasis aplikasi e-kinerja	3.061 orang	6.323.000	21,08%	49,80%	12,65%
11. Monitoring dan evaluasi penyelesaian LP2P	0	0	0%	0%	0%
12. Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN	408 orang	0	0%	101,49%	0%
13. Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	0	0	0%	0%	0%
14. Pemberian penghargaan dan pelepasan pensiun PNS					
a. Kartu Taspen	9 kartu	37.237.400	90,50%	18%	15,43%
b. Pensiun	153 orang			85%	
c. Penghargaan dan pelepasan pensiun	0			0%	
15. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	0	15.191.400	25,66%	0%	23,66%



### c. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi 10 kegiatan secara keseluruhan menunjukkan realisasi kinerja Renja dalam hal output telah mencapai 50%. Demikian pula pada capaian target Revisi Renstra masing-masing kegiatan sebesar 50% dengan masing-masing target kinerja selama 12 bulan. Tabel 2.5 menunjukkan realisasi dan capaian atas target triwulan II masing-masing kegiatan.

**Tabel 2.5.**  
**Reviu terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					
1. Penyediaan jasa surat menyurat	6 bulan	69.028.000	29,06%	50%	33,16%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 bulan	318.632.204	57,15%	50%	60,23%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 bulan	330.000	3,30%	50%	3,30%
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	6 bulan	21.736.000	26,56%	50%	35,9%
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	6 bulan	11.850.000	32,73%	50%	69,71%
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6 bulan	9.000.000	21,33%	50%	21,33%
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 bulan	8.500.000	42,50%	50%	85%
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 bulan	0	0%	50%	0%
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 bulan	170.739.800	35,55%	50%	25,53%
10. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	6 bulan	58.653.737	22,57%	50%	43,45%

### d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor terealisasi 50% dalam bentuk pengadaan pending ruangan (AC) sebanyak 4 unit. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa baik realisasi kinerja maupun capaian target triwulan II DPA 2018 masih di bawah 100% yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



**Tabel 2.6.**  
**Reviu terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>					
1. Pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit AC	27.940.000	51,23%	50%	111,76%
2. Pengadaan meubeleurn	0	0	0%	0%	0%
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	2.250.000	9%	100%	9%
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 bulan	15.913.705	21,22%	50%	21,22%

**e. Program Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian**

Program selanjutnya adalah penataan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terdiri atas empat kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pembangunan/pengembangan SIMPEG/SAPK. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 3 output kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 314.400.000. Target output pertama berupa jumlah pembangunan/pengembangan SIMPEG/SAPK sebanyak 2 aplikasi, akan tetapi kebijakan tahun ini menetapkan bahwa pengembangan aplikasi berpusat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Daerah, sehingga capaian kinerja menunjukkan 0%. Kedua, target output waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian selama 12 bulan, telah berjalan 6 bulan atau 50%. Ketiga, jumlah ASN yang memperoleh Kartu Pegawai tepat waktu ditargetkan 75 orang dan terealisasi sebanyak 11 orang atau 14,67%. Sedangkan output keempat, ditargetkan 70 orang ASN yang memperoleh Karis/Karsu tepat waktu dan terealisasi sebanyak 1 orang atau 1,43%. Secara keseluruhan, pada triwulan II kegiatan ini telah menyerap anggaran sebesar Rp. 5.625.000 atau 1,79%.
2. Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi dengan target sebanyak 1 dokumen formasi bagi Pemerintah Kabupaten Wajo. Namun dokumen formasi masih dalam proses penyusunan sehingga tingkat capaian pada



triwulan II masih 0%. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 23.818.000 atau sebesar 31,39%.

**Tabel. 2.7.**  
**Reviu terhadap Penataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program penataan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)</b>					
1. Pembangunan/ pembangunan SIMPEG/ SAPK					
a. Pembangunan/ pengembangan SIMPEG	0	5.625.000	1,79%	0%	3,14%
b. Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen/ arsip kepegawaian	6 bulan			50%	
c. Kartu Pegawai	11 orang			14,67%	
d. Karis/ Karsu	1 orang			1,43%	
2. Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN	0	23.818.000	31,39%	0%	36,64%

**f. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan**

Adapun program perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang ditargetkan terlaksana melalui 3 kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja SKPD, dengan target output sebanyak 2 dokumen Renja yang disusun. Pada triwulan II, realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen Renja, yaitu Renja Tahun 2020, sedangkan dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Adapun realisasi keuangan masih menunjukkan 0%.
2. Penyusunan LAKIP SKPD, dengan target output sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi pada triwulan I.
3. Penyusunan Renstra SKPD, dengan indikator kegiatan berupa jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Pada triwulan II, proses penyusunan Renstra Tahun 2019-2024 masih berlangsung dan baru akan ditetapkan pada triwulan III.
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan realisasi anggaran sebanyak 87%.



**Tabel. 2.8.**  
**Reviu terhadap Program Perencanaan dan**  
**Pelaporan Kinerja dan Keuangan**

Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Triwulan II DPA 2019	Capaian Target Revisi Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
	K	Rp	Rp	K	Rp
<b>Program penataan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)</b>					
1. Penyusunan Renja SKPD	1 dokumen	0	0%	50%	0%
2. Penyusunan LAKIP SKPD	1 laporan	0	0%	100%	0%
3. Penyusunan Renstra SKPD	0	0	0%	0%	0%
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4.698.000	87%	100%	59,47%





### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019**

Perumusan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo dalam Perubahan Renja Tahun 2019 berdasarkan pada analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2019. Adapun rencana program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo sebanyak 6 program dan 42 kegiatan. Pendanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019. Jumlah pagu indikatif dalam Perubahan Renja ini sebesar Rp. 6.337.688.000 (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang dapat dilihat pada Tabel. 3.1.



**TABEL 3.1.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**  
**KABUPATEN WAJO**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN WAJO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>																							
<b>Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>																							
04	05	08	05	01	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi						100%	100%	1,019,510,200	2,706,847,000	1,687,336,800			90%	2,718,745,560		
04	05	08	05	01	Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal (orang)	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal (orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		1	1	20,000,000	30,000,000	10,000,000	APBD	APBD	12	32,400,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan predikat BAIK (Orang)	Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan predikat BAIK (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		50	1	280,736,200	5,610,000	(275,126,200)	APBD	APBD	75	6,058,800	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	05	14	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat baik (Orang)	Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat baik (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		100	275	435,230,000	2,472,357,000	2,037,127,000	APBD	APBD	74	2,670,145,560	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	05	15	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat baik (Orang)	Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat baik (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		4	0	121,044,000	-	(121,044,000)	APBD	APBD	8	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
						Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM III dengan predikat baik (Orang)	Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM III dengan predikat baik (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		0	0						10			
						Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM IV dengan predikat baik (Orang)	Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM IV dengan predikat baik (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)		0	0						25			

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
04 05 08 05 16	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	-	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi dengan predikat BAIK (Orang)			-	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	60	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 05 17	Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat baik (Orang)	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat baik (Orang)				OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	17	17	162,500,000	153,880,000	(8,620,000)		APBD	APBD	11	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 05 31	Pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyuapan	-	Jumlah ASN yang memperoleh pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyuapan (orang)			-	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	0	68	-	45,000,000	45,000,000		APBD	APBD	43	48,600,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi</b>	<b>Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi</b>					<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>1,289,131,500</b>	<b>1,414,438,804</b>	<b>125,307,304</b>					<b>924,834,568</b>		
04 05 08 07 02	Seleksi penerimaan CPNS	Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS (Orang)	Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS (Orang)				OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	100	309	400,000,000	352,930,000	(47,070,000)		APBD	APBD	100	381,164,400	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07 03	Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas	Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas (Kali)	Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas (Kali)				OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	4	4	34,900,000	31,533,000	(3,367,000)		APBD	APBD	6	34,055,640	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu (Orang)	Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu (Orang)				OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1084	1084					APBD	APBD	1084		a	BKPSDM KAB. WAJO
		Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan gaji berkala tepat waktu (Orang)	Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan gaji berkala tepat waktu (Orang)				OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	222	222	268,190,000	165,231,500	(102,958,500)				222	178,450,020		

Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(16)	(17)	a/b/c	1/2/3				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
04	05	08	07	10	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	Jumlah PNS yang lulus ujian dinas (Orang)	Jumlah PNS yang lulus ujian dinas (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	5	5	29,400,000	8,416,000	(20,984,000)	APBD	APBD	5	9,089,280	a	BKPSDM KAB. WAJO
						Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Orang)	Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	50	50						50			
04	05	08	07	11	Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat	Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat (Dokumen)	Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat (Dokumen)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	2	2	126,260,000	115,930,200	(10,329,800)	APBD	APBD	2	125,204,616	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	07	17	Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator	Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator (Kali)	Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator (Kali)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	1	374,974,000	704,043,304	329,069,304	APBD	APBD	1	760,366,768	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	07	23	Penempatan jabatan pelaksana dan kabatan fungsional	Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (SK)	Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (SK)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	600	600	55,407,500	36,354,800	(19,052,700)	APBD	APBD	6	39,263,184	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	07		<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>Persentase tingkat kedisiplinan ASN</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>594,190,000</b>	<b>285,516,000</b>	<b>(308,674,000)</b>				<b>308,357,280</b>		
04	05	08	07	05	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan (Orang)	Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	400	400	64,208,000	43,183,750	(21,024,250)	APBD	APBD	400	46,638,450	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	07	09	Monitoring dan evaluasi penyelesaian LP2P	Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu (Orang)	Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	5246	0	92,400,000	-	(92,400,000)	APBD	APBD	5246	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04	05	08	07	12	Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin (orang)	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin (orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	6146	0	17,500,000	-	(17,500,000)	APBD	APBD	6296	-	a	BKPSDM KAB. WAJO

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)		
04 05 08 07 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja (orang)	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja (orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	6146	0	127,000,000	-	(127,000,000)	APBD	APBD	6296	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07 13	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Aplikasi E-Kinerja	Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis Aplikasi E-kinerja (Orang)	Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis Aplikasi E-kinerja (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	6146	6137	30,000,000	22,608,000	(7,392,000)	APBD	APBD	4000	24,416,640	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07 14	Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian	Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Orang)	Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	2	0	8,000,000	-	(8,000,000)	APBD	APBD	2	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 07 18	Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN	Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu (Orang)	Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	132	0	68,240,000	-	(68,240,000)	APBD	APBD	132	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
		Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu (Orang)	Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	270	0				270					
04 05 08 07 19	Pemberian Penghargaan dan Pelepasan Pensiun PNS	Jumlah Kartu Peserta Taspen yang diterbitkan tepat waktu (Kartu)	Jumlah Kartu Peserta Taspen yang diterbitkan tepat waktu (Kartu)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	50	50	343,450,000	77,848,000	(265,602,000)	APBD	APBD	0	84,075,840	a	BKPSDM KAB. WAJO
		Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu (Orang)	Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	180	180				150					
		Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun (Orang)	Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun (Orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	179	168				142					
04 05 08 07	Seleksi Penerimaan PPPK	Jumlah peserta yang lulus seleksi penerimaan PPPK (orang)	Jumlah peserta yang lulus seleksi penerimaan PPPK (orang)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	0	110	-	185,060,000	185,060,000	APBD	APBD	400	199,864,800	a	BKPSDM KAB. WAJO

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(16)	(17)	a/b/c	1/2/3
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)
04 05 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (Angka)	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (Angka)					90.07	90.07	1,838,805,300	1,501,980,150	(336,825,150)				1,622,138,562		
04 05 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	220,700,000	188,905,000	(31,795,000)	APBD	APBD	12	204,017,400	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	557,515,300	619,515,300	62,000,000	APBD	APBD	12	669,076,524	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)	APBD	APBD	12	5,400,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	62,640,000	67,270,800	4,630,800	APBD	APBD	12	72,652,464	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	17,000,000	19,650,000	2,650,000	APBD	APBD	12	21,222,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	42,200,000	36,714,000	(5,486,000)	APBD	APBD	12	39,651,120	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	20,000,000	17,400,000	(2,600,000)	APBD	APBD	12	18,792,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	15,000,000	4,800,000	(10,200,000)	APBD	APBD	12	5,184,000	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	683,110,000	409,664,250	(273,445,750)	APBD	APBD	12	442,437,390	a	BKPSDM KAB. WAJO

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(16)	(17)	a/b/c	1/2/3
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)
04 05 08 01 22	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian (Bulan)	Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	210,640,000	133,060,800	(77,579,200)	APBD	APBD	12	143,705,664	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (Angka)	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (Angka)					90.07	90.07	120,000,000	75,913,696	(44,086,304)				81,986,792		
04 05 08 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	0 AC 0 Printer 0 Laptop	4 AC 2 Printer 2 Laptop	-	28,040,000	28,040,000	APBD	APBD	4 AC 2 Printer 2 Laptop	30,283,200	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 02 10	Pengadaan meubeuleur	Jumlah pengadaan meubeuleur (Unit)	Jumlah pengadaan meubeuleur (Unit)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	50 Kursi kerja	0 Kursi kerja	20,000,000	-	(20,000,000)	APBD	APBD	1 Rak Sound System	-	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Gedung)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Gedung)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	1	25,000,000	6,837,968	(18,162,032)	APBD	APBD	1	7,385,005	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan/ dinas operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	12	12	75,000,000	41,035,728	(33,964,272)	APBD	APBD	12	44,318,586	a	BKPSDM KAB. WAJO
04 05 08 08	Program penataan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	Persentase ASN yang datanya akurat	Persentase ASN yang datanya akurat					95%	95%	336,380,000	298,740,600	(37,639,400)				322,639,848		
04 05 08 08 01	Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK	Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK (Aplikasi)	Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK (Aplikasi)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	2	3	260,500,000	233,970,000	(26,530,000)	APBD	APBD	3	252,687,600	a	BKPSDM KAB. WAJO
		Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian (Bulan)	Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian (Bulan)					12	12						12			

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab						
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif								
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (12) - (11)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)				
								75	5						5									
								70	70						70									
04	05	08	08	02	Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN (Dokumen)	Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN (Dokumen)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	2	75,880,000	64,770,600	(11,109,400)	APBD	APBD	1	69,952,248	a	BKPSDM KAB. WAJO		
04	05	08	26		Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP oleh Inspektorat	Penilaian LAKIP oleh Inspektorat					80	80						80					
						Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan					85%	85%		26,575,000	11,068,000	(15,507,000)			85%		11,953,440		
						Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti						100%	100%						100%				
04	05	08	26	01	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja (Dokumen)	Jumlah dokumen Renja (Dokumen)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	2	2	5,925,000	1,935,000	(3,990,000)	APBD	APBD	1	2,089,800	a	BKPSDM KAB. WAJO		
04	05	08	26	02	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah LAKIP (Laporan)	Jumlah LAKIP (Laporan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	1	6,750,000	1,935,000	(4,815,000)	APBD	APBD	1	2,089,800	a	BKPSDM KAB. WAJO		
04	05	08	26	03	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang telah disusun (Dokumen)	Jumlah dokumen Renstra yang telah disusun (Dokumen)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	1	7,000,000	2,500,000	(4,500,000)	APBD	APBD	2	2,700,000	a	BKPSDM KAB. WAJO		
04	05	08	26	05	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun (Laporan)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun (Laporan)			OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	OPD (Jalan Kejaksaan No. 5B Sengkang)	1	1	6,900,000	4,698,000	(2,202,000)	APBD	APBD	1	5,073,840	a	BKPSDM KAB. WAJO		
<b>TOTAL</b>										<b>5,224,592,000</b>	<b>6,294,504,250</b>	<b>1,069,912,250</b>			<b>5,990,656,050</b>									



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Catatan Penting

Dokumen Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2019 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2019 juga dilakukan karena adanya kegiatan baru akibat dari adanya kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan.

Dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta tetap berorientasi pada tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Muatan informasi dalam dokumen ini berupa sasaran, indikator kinerja serta rencana capaian dari program dan kegiatan menjadi tolok ukur dalam sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, maka diharapkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam bidang kepegawaian dapat terlaksana dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi.

### 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

BKPSDM Kabupaten Wajo dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan memperhatikan beberapa kaidah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- a. BKPSDM Kabupaten Wajo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- b. BKPSDM Kabupaten Wajo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019, termasuk diantaranya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Wajo Tahun 2019.



- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Kabupaten Wajo Tahun 2019, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2019.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi BKPSDM Kabupaten Wajo serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo.

Sengkang, 2019

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM

**Drs. HERMAN**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196407281992081001



